

## EKSISTENSI MANUSIA PANCASILAIS DEWASA INI DARI PERSPEKTIF KONSEP MANUSIA PERSONALIS

**Kristoforus Sri Ratulayn Kino Nara**

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

[kristoforus@ukwms.ac.id](mailto:kristoforus@ukwms.ac.id)

---

### **Abstract**

---

*Keywords: Human,  
Pancasila,  
Personalism.*

---

*This article discuss what or who Pancasilaists are in today's context. The focus of attention in the following article is on the question of what is the nature of a Pancasilaist human and how is the existence of a Pancasilaist human being. In the current era of globalization and technological disruption, which is being accelerated by the COVID-19 pandemic, it is important to rethink your identity to Indonesia. Because of course Indonesia is not impermeable to the influence of the dynamics of global developments. The author tries to re-examine who the Pancasila people are and how they exist. The method that the author will use is to use a knife of human concept analysis in the Personalism flow. This paper can offer a new interpretation and perspective on Pancasila and what a Pancasilaist human looks like when viewed from the perspective of Personalism.*

---

### **Abstrak**

---

**Kata kunci:**  
Manusia,  
Pancasila,  
Personalisme.

---

Tulisan ini akan membahas tentang apa atau siapa manusia Pancasila di tengah konteks dewasa ini. Pusat perhatian dalam tulisan berikut adalah pada pertanyaan apa hakikat manusia Pancasila dan bagaimana eksistensi manusia Pancasila. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi saat ini yang semakin dipercepat dengan pandemi COVID-19 penting untuk memikirkan ulang jati diri ke Indonesiaan. Karena tentu Indonesia tidak kedap dari pengaruh dinamika perkembangan global. Penulis mencoba menelaah Kembali siapa manusia Pancasila dan bagaimana eksistensinya. Metode yang akan penulis gunakan adalah menggunakan pisau analisis konsep manusia dalam aliran Personalisme. Tulisan ini bisa menjadi tawaran tafsir dan perspektif baru atas Pancasila dan seperti apa manusia Pancasila jika dilihat dari perspektif pemikiran Personalisme.

---

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini bangsa dan negara ini masih saja harus menghadapi kenyataan permasalahan diberbagai bidang yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Ibarat kanker

krisis yang terus menggerogoti, yang tidak cukup hanya diobati dengan obat Pereda rasa sakit. Yudi Latif dalam bukunya merumuskan secara epik dan getir demikian “Orang bilang, tanah kita tanah surga: kaya sumber daya, indah permai bagai untaian zamrud yang melilit khatulistiwa. Namun, di taman nirwana dunia timur ini, kelimpahan mata air kehidupan mudah berubah menjadi air mata” (Latif, 2015). Konteks yang sangat erat dan mudah untuk ditunjuk dari kutipan tersebut adalah masalah ekonomi, bagaimana mimpi indah kemerdekaan sebagai jembatan emas menuju kepada kehidupan yang Bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur dapat dengan mudah menjelma menjadi sebuah mimpi buruk: tertindas, terpecah-belah, diperbudak, timpang, miskin. Pengalaman penanganan pandemi membuat negara-bangsa ini berbenah. Factor kesehatan dan ekonomi harus berhadapan. Negara harus bersusah payah untuk meminimalisir dampak atas pandemi.

Globalisasi menjadi salah satu peluang sekaligus tantangan serius dalam konteks bagaimana negara Pancasila dengan orang-orangnya bisa “berenang” dalam arus di dalamnya tanpa menjadi hanyut. Mengutip salah satu definisi tentangnya, Globalisasi adalah intersifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di seberang jauh dan begitupun sebaliknya”(Giddens, 1990) suka atau tidak, sadar atau tidak kita hidup di tengah arus globalisasi. Mungkin Pandemi COVID-19 yang setahun belakangan ini dialami oleh masyarakat global semakin membuka dan menyadarkan bahwa manusia hidup di tengah arus besar globalisasi ini, tidak terkecuali dengan manusia Indonesia, Manusia Pancasila.

Globalisasi mengubah susunan cara berada atau eksistensi manusia secara mendalam, bahkan hampir dalam setiap aspek kehidupannya. Lingkaran Sosialitas yang konvensional mengatakan bahwa lingkaran sosialitas manusia berkembang secara bertahap mulai dari keluarga, kampung, kelompok etnis/agama, bangsa, hingga kemanusiaan. Lingkaran tersebut seolah kabur karena sejak kecil, seorang anak yang dekat dengan sarana komunikasi akan sudah mulai terbiasa dengan pergaulan global, tanpa perlu dulu melalui lingkaran kampung atau masyarakat sekitar. Ranah besar yang kuat adalah ranah negara-bangsa pada satu sisi dan globalisasi menarik Sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus global (Latif, 2018). Situasi kesaling tergantung ini tentu membuat tidak ada negara yang mengisolasi dirinya. Ada sisi positif dan tentu negatifnya dari dampak globalisasi ini.

Pada tulisan ini penulis tidak akan berfokus pada bagaimana menghadapi globalisasi dan menyelesaikannya. Tulisan ini akan membahas tentang apa atau siapa manusia Pancasila di tengah konteks dewasa ini. Pusat perhatian dalam tulisan berikut adalah pada pertanyaan apa hakikat manusia Pancasila dan bagaimana eksistensi manusia Pancasila. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi saat ini yang semakin dipercepat dengan pandemi COVID-19 penting untuk memikirkan ulang jati diri ke Indonesiaan. Karena tentu Indonesia tidak kecap dari pengaruh dinamika perkembangan global. Penulis mencoba menelaah Kembali siapa manusia Pancasila dan bagaimana eksistensinya?

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi Pustaka. Objek material dari penelitian ini adalah Manusia Indonesia yang hidup dengan dasar Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Objek formal dari penelitian ini adalah sudut pandang personalis tentang manusia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah interpretasi atas Pancasila ditinjau dengan sudut manusia dalam perspektif personalis.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Tentang Manusia**

Ada banyak teori tentang apa atau siapa itu manusia. Bakker dalam bukunya menyebut adanya kesulitan titik persoalan awal dari mana kajian berangkat apabila menjelaskan tentang filsafat manusia. (Bakker, 2000) Untuk kepentingan penulisan makalah ini, tentu tidak mungkin penulis menampilkan seluruh teori tentang manusia. Karena bisa jadi antar satu pemikiran dengan pemikiran yang lain akan berbeda isi dan pemahamannya. Pemaparan tentang poin-poin pemikiran manusia di bawah ini akan mengikuti pendekatan pemikiran pemikir aliran personalis yang mulai tumbuh subur pada abad 20 sebagai reaksi atas depersonalisasi dalam pemikiran modern. Bagi pemikir personalis, pandangan akan apa atau siapa manusia banyak mengalami reduksi dan depersonalisasi. Sebagai contoh, bagaimana pemahaman dan kesadaran akan manusia yang sempurna yang nampak dalam perkembangan seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Daripadanya kemudian mengeksplorasi seluruh kapasitas manusia, seperti intelek, perasaan, kehendak, dll namun sayangnya justru malah jatuh dalam reduksi tertentu seperti humanism mekanistik. Atas dasar tersebut penulis akan berupaya memaparkan beberapa poin tentang manusia dan eksistensinya secara lebih menyeluruh (holistik)

## **2. Individualitas, Personalitas, Dan Martabat Manusia**

Keberadaan manusia berbeda dari objek-objek lain selain manusia. Meskipun memang Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai hewan berakal budi (*ho anthropos zoon noetikon*) (Aristoteles, Politics). Definisi ini memang tidak bisa ditolak sama sekali karena memang berangkat dari realitas objektif. Namun secara menyeluruh perlu dikritisi bahwa keberadaan manusia berbeda dari keberadaan dengan hewan atau benda-benda mati. Membicarakan keberadaan manusia bukanlah sekedar membicarakan tentang kumpulan materi, bukan pula elemen-elemen individual. Singkatnya, gambaran keberadaan manusia melampaui pemikiran tentang manusia dari kaum idealis, materialis, determinis dan bahkan objektivis. Keberadaan manusia sangat personal, unik, dan tak tergantikan. Pengalaman-pengalaman hidup masing-masing person akan sangat berbeda satu dengan yang lain. Manusia itu seseorang, bukan sesuatu. Keberadaan setiap manusia memiliki *inner self, inner life* yang menjadi miliknya sendiri secara eksklusif. Singkatnya, pada sisi imanen, keberadaan seseorang selalu terkait dengan ada bersama dengan objek-subjek lain, saling berdinamika, berelasi, dll. Pada sisi transenden, keberadaan manusia melampaui yang-lain, menyadari, memikirkan perbedaan dengan yang lain, menginginkan, merasakan, mengaktualkan dirinya sendiri.

Pertimbangan perlakuan akan kekhasan dan keunikan realitas keberadaan manusia dan realitas yang lain, maka dibutuhkan pula suatu paradigma etis yang berbeda. Terjadi gerak dari pemahaman akan keberadaan manusia secara ontologis ke arah pemahaman etis. Maka pada konteks ini yang membedakan keberadaan manusia dengan yang lain adalah martabatnya sebagai manusia. Martabat manusia merujuk pada nilai yang terkandung pada manusia sebagai seseorang (*somebody*), bukan sesuatu (*something*). Martabat manusia bukanlah harga (*price*) yang diberikan/ dihadiahkan oleh otoritas negara. Martabat manusia itu sesuatu yang *inherent* (terkandung di dalam dirinya sendiri), melampaui segala nilai yang ada, tak tergantikan. Pemahaman yang tepat akan keberadaan manusia dengan martabatnya juga ingin menyatakan bahwa martabat manusia tidak bergantung pada berbagai variable, seperti kecerdasan alami, Kesehatan, pilihan moral, dll. Martabat manusia hanya bergantung pada manusianya yang bukan sesuatu melainkan seseorang.

Pemahaman akan keberadaan manusia dengan martabatnya secara dimensi individual perlu bergerak menuju dimensi etis dan selanjutnya politis. Artinya, keunikan dan kekhasan manusia diarahkan pada dimensi menengok relasi keberadaannya dengan yang

lain. Keberadaan manusia yang unik dan khas tersebut juga mengandung kekhas di dalamnya bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Keberadaan manusia tidak akan pernah ada dalam isolasi dan akan menemukan kesatuan dengan orang lain. Relasi interpersonal selalu merupakan hal yang konstitutif, bukan opsional. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila ia hidup tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain.

### 3. Person Dan Komunitas

Sejak Yunani Kuno pemikir seperti Aristoteles telah memberikan argumentasi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, secara kodrati manusia merupakan makhluk yang selalu terhubung dengan yang lain. Manusia tidak pernah akan ada dalam isolasi. Aristoteles bahkan menegaskan bahwa manusia akan menemukan kesempurnaannya dalam kesatuan dengan orang lain. Relasi dengan yang lain bukanlah sebuah pilihan (opsional) melainkan sebuah keniscayaan. Manusia sebagai pribadi tidak pernah ada dalam keterasingan, dan bahkan seorang manusia menemukan kesempurnaan manusiawinya hanya dalam persekutuan dengan orang lain.

Keberadaan atau eksistensi manusia itu *being-for-relation* karena relasi bukan hanya sekedar asesoris, melainkan esensial dalam keberadaan dirinya secara personal. Masyarakat bukanlah sekedar soal kegunaan atau kesepakatan, tetapi keberadaannya merefleksikan suatu kecenderungan alami dari manusia yang selalu mencari kawan dan masuk dalam kesatuan spiritual dengannya. Tentu ada perbedaan antara masyarakat (*society*) dan komunitas (*communion/community*). Masyarakat kadang menunjuk pada makhluk selain manusia yang hidup dan berinteraksi lebih sebagai kelompok daripada dalam isolasi satu dengan yang lain, sedangkan komunitas merujuk pada cara berada dan bertindak yang secara umum menunjukkan sikap saling menegaskan dan mengafirmasi satu sama lain, yang meningkatkan pemenuhan keunikan satu sama lain dalam relasi mutualistik.

Pada akhirnya merefleksikan keberadaan manusia di tengah yang lain, salah satu panggilan manusia untuk terlibat dengan komunitas berakar pada kodrat rasional melalui subyektivitas. Dengan kehendak bebasnya, manusia tidak bisa menghendaki, memiliki, atau mengatur orang lain, begitu pula sebaliknya. Hanya saja, manusia bisa memilih secara bebas untuk memberikan dirinya pada orang lain. Pada tataran ini, *self-possession* dan *self-government* memberi ruang spesial pemberian diri atau cinta pada persona lain. "panggilan

memberikan diri” menunjukkan kekhasan bukan hanya kesatuan belaka, tapi kesatuan dalam kasih. Hanya persona yang bisa memberi atau menerima kasih.

#### **4. Apakah Pancasila Itu Dan Mengapa Pancasila?**

Pancasila merupakan lima nilai dasar yang kemudian diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima dasar tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima dasar tersebut secara legal formal adalah rumusan yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Di dalam Alinea IV tersebut termuat rumusan mengenai tujuan negara dan landasan yang digunakan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah Pancasila. Pancasila awalnya dimaksudkan sebagai dasar filosofis negara Indonesia merdeka seperti yang disebutkan oleh ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat: “Negara Indonesia merdeka yang akan kita bentuk, apa dasarnya?” pertanyaan tersebut kemudian coba direspon oleh beberapa tokoh, seperti Mohamad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Secara khusus, memang kemudian Soekarno dalam pidatonya di Sidang BPUPKI di tanggal 1 Juni 1945 yang langsung menyebut dan menamai kelima dasar yang ia ajukan diberi nama Pancasila. Sukarno mengajukan Pancasila sebagai *philosophisce grondslag* (dasar filosofis) dan *weltanschauung* (pandangan akan dunia) dari negara Indonesia (Soekarno,2002). Selanjutnya, mengenai dasar negara ini dibedakan Sukarno antara dasar statis sekaligus dasar dinamis. Soekarno mengingatkan bahwa “harus dapat meletakkan negara itu di atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini;... kita memerlukan dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis.”

Pancasila resmi disahkan menjadi dasar falsafah negara (*philosophisce grondslag*), ideologi negara dan pandangan hidup (*weltanschauung*) sejak tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Untuk menelaah istilah dan makna dari posisi Pancasila tersebut tentu bisa

merujuk pada apa yang disampaikan oleh Soekarno ketika pidatonya 1 Juni 1945. Dalam pemikiran Soekarno istilah "*philosophische grondslag*" ia definisikan sebagai fundamen, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. (Soekarno, 2002) Maka dengan memakai istilah *philosophische grondslag*, Soekarno hendak menegaskan posisi Pancasila sebagai Dasar Negara. Dasar Negara berarti bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat/falsafah negara.

Istilah kedua yang dipakai oleh Soekarno adalah *Weltanschauung*. Dalam memaparkan istilah tersebut Soekarno tidak menunjuk secara persis apa definisi atas istilah tersebut. Soekarno memberikan orientasi dengan menunjuk contoh-contoh untuk memahami istilah tersebut dengan beberapa contoh di negara lain seperti: Hitler mendirikan Jermania di atas "*national-sozialistische Weltanschauung*". Lenin mendirikan negara Soviet di atas "*Marxistische, Historisch Materialistische Weltanschauung*", Nipon mendirikan negara di atas "*Tenno Koodo Seisin*", Ibn Saud mendirikan negara Arab Saudi di atas satu "*Weltanschauung*", bahkan di atas dasar agama, yaitu Islam, Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka di atas "*Weltanschauung*" San Min Chu I, yaitu Mintsu, Minchuan, Minshen: Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme. Jadi bisa sedikit disimpulkan bahwa yang ada dalam pikiran Soekarno dalam memahami *Weltanschauung* saat itu adalah lebih dekat dengan maksud Ideologi.

Istilah Ideologi pertama dicetuskan oleh Desstutt de Tracy (1796) di Prancis yang berarti *science of ideas, the study of origins, evolution and nature of ideas*. Sedangkan kalau merujuk pada arti terminology yang lain seperti Yunani akan ditemukan ideologi dari kata Idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan Logi/Logos yang artinya ilmu, pengetahuan. Maka secara harafiah ideologi bisa diterjemahkan sebagai pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan akan ide-ide. Istilah ideologi tentu mengalami banyak perubahan dalam perkembangannya. Secara umum, ideologi kemudian dipahami sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak (Heywood, 2012). Pada titik ini lebih tepat apabila oleh Soekarno ideologi dipahami sebagai sebuah pandangan akan realitas, pandangan hidup pandangan dunia bangsa Indonesia yang hendak dijadikan sebagai ideologi negara.

Mengikuti pembagian oleh Wolters dan Driyarkara, filsafat/falsafat dan *Weltanschauung* merupakan dua hal yang berbeda. (Wolters, 1983) Filsafat lebih dekat dipahami sebagai sebuah upaya rasional dengan metode ilmiahnya dan tentu mengandung klaim validitas universalnya. Sedangkan *Weltanschauung* lebih berkonotasi sebagai

pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial, dan historical. Dengan kata lain, filsafat berada pada lingkaran pengetahuan, sedangkan *Weltanschauung* berada pada lingkaran dunia kehidupan yang lebih luas (Driyarkara, 2006).

Filsafat sebagai filsafat tidak niscaya menjadi *weltanschauung*. Filsafat memang mengarahkan orang untuk merefleksikan realitas sedalam-dalamnya. Namun untuk kemudian filsafat tersebut berubah menjadi sebuah *weltanschauung*, filsafat tersebut harus dijadikan sikap dan pendirian orang/sekelompok orang dalam memandang dunia kehidupannya. Dari sebuah pemikiran yang abstrak berubah menjadi pendirian hidup untuk kemudian dijalankan dalam tindakan konkret dalam hidup.

*Weltanschauung* sendiri tidak selalu juga harus dimulai dan melahirkan filsafat. *Weltanschauung* sebagai sebuah pandangan hidup bisa jadi ada lebih dulu dan dihayati dalam hidup sehari-hari oleh orang/sekelompok orang tanpa didahului rumusan filsafat secara sistematisnya. Memang ada *Weltanschauung* yang kemudian rumusan filsafat dan filsafat yang berbuah menjadi *Weltanschauung*.

Kembali pada pemikiran Soekarno, dalam pandangannya *Weltanschauung* orang masyarakat nusantara ada dalam berbagai bentuk seperti keragaman kearifan hidup masing-masing suku, keagamaan. Agar *weltanschauung* itu tidak berdiri sendiri-sendiri antar daerah dan golongan, maka *weltanschauung* tersebut perlu dirajut dan dirumuskan secara sistematis dan rasional yang kemudian sebangun dengan filsafat. Pada poin ini, Pancasila kemudian bisa dikatakan sebagai ideologi “integralistik” yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan (Latif, 2015). Artinya, dalam wilayah privat dan komunitas, setiap orang dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Pancasila tidak hendak mengintervensi pengembangan moral individual dan komunitas. Namun, apabila berada pada lingkaran wilayah publik kenegaraan, setiap orang dan golongan harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu bersama. Pancasila dengan penuh kebijaksanaan bisa mencegah pengembangan moral individual dan kemountasi yang dapat membahayakan kehidupan publik.

Pada titik ini perlu ditegaskan bahwa harusnya Pancasila menjadi cita-cita, falsafah, ideologi baik bagi perseorangan maupun golongan semua manusia Indonesia. Dengan kata lain, manusia Indonesia adalah manusia Pancasila, yaitu manusia yang dalam eksistensi hidupnya baik secara individual maupun bersama sebagai sebuah bangsa percaya pada yang ada dalam prinsip-prinsip hidup bersama di Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai sebuah landasan idealitas bersama mengandung rumusan prinsip-prinsip dasar moralitas



hidup bersama yang berbeda, tetapi intinya sama. Pancasila mengangkat lima keyakinan tentang kehidupan bersama sejak ratusan tahun terwujud dalam komunitas-komunitas sosial-budaya Nusantara. Apabila dicermati, Pancasila bukan hanya mengangkat nilai-nilai lokalitas masyarakat Nusantara, melainkan mengangkat keyakinan prinsip hidup bersama yang juga menjadi tolak ukur keberadaan suatu negara di seluruh dunia (Suseno, 2021). Yudi Latif bahkan menyebut bahwa dalam rangkaian sila-sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan (Latif, 2015). Berikut penulis akan memaparkan secara singkat prinsip-prinsip dari masing-masing sila

#### **4.1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Dalam pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 bisa diambil pemahaman bahwa dengan sila Ketuhanan hendak ditunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bertuhan yang mana tiap warganya pun ber-Tuhan pada Tuhannya sendiri-sendiri atau beragama meski berbeda-beda agamanya. Lebih lanjut, yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah adanya keterbukaan terhadap realitas perbedaan itu disertai hormat-menghormati. Menurut Notonagoro sila pertama ini menggariskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi "pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan, bagi sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan atau anti keagamaan atau bagi paksaan agama." (Notonagoro, 1980) Dengan kata lain, di Indonesia ini "seharusnya hanya ada toleransi yang sejati." (Notonagoro, 1980).

Sila pertama ini mengandung prinsip Pluralisme. Pluralisme dalam konteks ini adalah sebuah sikap kesediaan untuk menerima/menoleransi kemajemukan baik itu religius, kultural, filosofis, pandangan hidup masing-masing orang dan komunitas sejauh tidak eksklusif-intoleran sendiri. Jadi hendaknya setiap manusia Pancasilais mempunyai kemampuan psikologis dan kesediaan untuk hidup secara positif, penuh perdamaian, dan biasa untuk bergaul bersama dengan setiap anggota masyarakat yang berbeda. Dalam konteks negara, alam pemikiran sila pertama mengandung dasar fundament etik kehidupan bernegara. Lebih jelas, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan "agama" dan "negara" apalagi mempunyai pretensi menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas semata. Negara menurut Pancasila diharapkan mampu melindungi dan mengembangkan kehidupan Bergama. Selanjutnya perlu ditegaskan oleh Yudi Latif bahwa negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independent dari dikte-dikte agama (Latif, 2015).

Dalam konteks personalis, pluralism tentu saja mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan suara hati, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, dan tentu saja toleransi. Lawan dari sikap ini tentu saja intoleransi, yaitu segenap tindakan untuk memaksakan dominasi terhadap orang lain tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dipaksa. Tidak boleh ada segenap paksaan dalam hal agama, kepincikan ideologis yang hendak memaksakan pandangannya kepada orang lain. Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa juga menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada yang boleh didiskriminasi karena keyakinan religiusnya. Kemampuan untuk hidup dan menerima perbedaan yang ada adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter bersama suatu bangsa.

Lebih lanjut, mengenai refleksi atas kodrat kemanusiaan yang terkandung dalam sila pertama ini adalah bahwa keberadaan atau eksistensi manusia tidak berasal tanpa sebab, melainkan ada yang diciptakan. Kesadaran akan adanya Tuhan sebagai Pencipta, Sang Penyebab Pertama, yang membuat manusia ada. Adanya manusia tentu bersifat kontingen, relatif, terbatas, dan dengan demikian membutuhkan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak (Latif, 2015).

#### **4.2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab**

Menurut Notonagoro kemanusiaan yang disebut dalam sila ini adalah kemanusiaan dengan unsur-unsur hakiki dari manusia yaitu sebagai yang "bhineka-tunggal, majemuk-tunggal atau monopluralis." (Notonagoro, 1980) Maksudnya adalah manusia yang monopluralis yang memiliki karakter-karakter yang membuatnya menjadi yaitu "manusia baik." (Notonagoro, 1980). Ada empat karakter yang dimaksud yaitu "cinta kasih, bijaksana, adil, dan sederhana." (Notonagoro, 1980) Selain adil, pada kemanusiaan itu terdapat juga penghargaan pada semua orang yang bebas dari "chauvenistis" dan "harga diri yang berlebihan." (Notonagoro, 1980)

Sila kedua mengandung pula prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia dipahami sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena ia manusia, bukan pemberian/hadiah oleh masyarakat atau negara. Dengan demikian hak-hak asasi tersebut tidak bisa dicabut. Penghormatan atas hak-hak asasi manusia menjadikan semakin nyata atau operasionalnya bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan agar martabatnya sebagai nilai pada dirinya sendiri dihormati. Pemahaman atas hak-hak asasi dipahami dalam dimensi kemutlakannya dan kontekstualnya. Hak-hak asasi berdimensi mutlak dalam arti berlaku tanpa kecuali bagi manusia manapun; manusia

bermartaban pertama-tama adalah karena ia diciptakan secara istimewa oleh Allah. Dimensi kontekstual berarti hak-hak asasi baru mempunyai fungsi dan mulai disadari dalam sejarah moderintas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, melainkan sebaliknya terancam oleh negara modern dan komodifikasi ekonomis (Suseno, 2021).

Hak-hak asasi manusia merupakan sebuah garansi atau jaminan utama atas sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang di dalamnya terkandung maksud untuk menolak kekejaran dan eksklusivisme suku dan ras. Hak-hak asasi di Indonesia sering dicurigai sebagai pemikiran barat yang erat dengan liberalism dan individualism ala Barat. Pada dasarnya, memang kenyataannya bahwa perjuangan atas hak-hak asasi manusia adalah upaya menjunjung tinggi kebebasan sebagai salah satu nilai terluhur manusia. Perlindungan atas hak-hak asasi manusia justru untuk melindungi manusia terhadap individualisasi. Hak-hak asasi manusia adalah bukti solidaritas suatu masyarakat dengan para warga yang paling lemah (Suseno, 2021).

Dalam konteks eksistensi manusia, sila kedua merupakan refleksi atas keberadaan manusia yang merupakan ada bersama. Pada kenyataannya manusia menjumpai keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus mengembangkan cara berada dengan yang lain dengan yaitu kasih pada yang lain, mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain (Latif, 2015). Hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Menurut Pancasila, nilai kemanusiaan universal berasal dari hukum Tuhan. Prinsip ini kemudian mengarah pada prinsip kebangsaan yang luas, yang mengarah pada persaudaraan dunia. Dalam konteks pergaulan global, bangsa Indonesia (manusia Pancasila) menggunakan segenap daya dan pengetahuan yang dimiliki untuk secara bebas-aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial. Sedangkan konteks pergaulan dengan sesama anak bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar asasi warga negara yang ladasan etik persaudaraan universal ini adalah adil dan beradab. Demikianlah yang harus menjadi cara berada eksistensi manusia Pancasila.

#### **4.3. Sila Persatuan Indonesia**

Menurut Notonagoro pemahaman mengenai sila ketiga “Persatuan Indonesia” adalah bahwa sila ini menggariskan supaya perbedaan dan pertentangan tidak boleh merusak tapi justru harus “memelihara dan mengembangkan kesatuan kebangsaan “kesatuan kebangsaan.”(Notonagoro, 1980) Lebih dalam, Negara sesungguhnya bukanlah sekedar

struktur kekuasaan administratif semata. Melainkan ungkapan solidaritas kebersamaan sebuah bangsa dengan perasaan senasib sepenanggungan. Jika merujuk sejarah, kesadaran untuk Bersatu sangat dipengaruhi oleh pengalaman ketertindasan dan penjajahan. Hal tersebut bisa direfleksikan mulai dari masa pergerakan nasional yang kemudian memuncak pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Semangat solidaritas sebagai bangsa senasib sepenanggungan itu menyemangati untuk perjuangan selanjutnya dalam mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Dalam konteks cara berada manusia personalis manusia Pancasila, sila ketiga ini menekankan kesadaran bahwa manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila ia hidup tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbangkan sesuatu pada kehidupan manusia-manusia lain. Dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkret dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Hal tersebut tentu menegaskan apa penjelasan tentang manusia diawal yang mengatakan bahwa manusia itu *being for relation*. Magnis Suseno menyebut bahwa pergaulan sosialitas manusia berkembang secara melingkar (Suseno, 2021): mulai dari keluarga sebagai lingkaran terkecil. Kemudian berlanjut ke sosialitas kampung, orang-orang di sekitar tempat ia tinggal. Berlanjut lagi ke lingkaran sosialitas yang lebih luas seperti kelompok etnis ataupun kelompok agama. Lingkaran sosialitas selanjutnya adalah sosialitas kebangsaan, di mana lingkaran ini mestinya sudah melampaui lingkaran-lingkaran sebelumnya. Hingga lingkaran sosialitas terluar adalah solidaritas sebagai manusia (global).

Penekanan yang perlu untuk ditegaskan adalah bahwa manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Artinya, bahwa masing-masing lingkaran yang lebih kecil tentu membekali manusia sebagai modal untuk ia keluar ke lingkaran sosialitas yang lebih luas. Konkretnya, keluarga mestinya membekali setiap anggotanya untuk siap anggota tersebut kemudian siap masuk dalam pergaulan di kelompok etnis/agama dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu seterusnya, etnis/agama idealnya juga berpartisipasi untuk membekali setiap anggotanya untuk siap memasuki pergaulan kebangsaan. Manusia-manusia yang keluar dari lingkaran sosialitas etnis/agama idealnya adalah manusia-manusia yang penuh kasih dan damai pada manusia dari kelompok lain yang ia jumpai, bukan malah sebaliknya menjadi orang-orang yang agresif.

Lingkaran kesosialitan perlu juga dipahami dengan keterbatasan masing-masing. Artinya, setiap manusia Pancasila mestinya memahami bahwa apa yang ada dalam

lingkaran sosialitas keluarga tentu ada batasnya. Konkretnya, tidak bisa orang menuntut orang lain dalam lingkaran sosialitas yang lebih luas menuntut secara buta manusia lain tersebut seturut dengan apa yang ia terima dalam keluarga. Apa yang berlaku sebagai lingkaran keluarga yang hanya berlaku pada batas anggota keluarga saja. Begitu pula dalam lingkaran sosialitas kelompokpun demikian. Apa yang berlaku dalam lingkaran kesosialitasan kelompoknya tidak bisa serta-merta dipaksakan untuk belaku total pada lingkaran kebangsaan sebagai tempat bertemunya manusia-manusia dari lingkaran kesosialan kelompok-kelompok.

Negara juga perlu mendorong dan membuat strategi agar manusia-manusia tidak hanya berhenti memperjuangkan kesosialitasan kelompoknya saja tapi juga mempunyai strategi agar manusia-manusia Indonesia mau bergerak dari terikat pada lingkaran kesosialitasan sebagai suatu bangsa. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam internalisasi nilai-nilai kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari berbagai keberagaman masyarakat Indonesia perlu dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang memang menampilkan ekspresi persatuan dalam keberagaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan *bhinneka tunggal ika*.

Hingga akhirnya, tidak hanya berhenti juga pada lingkaran kesosialitasan negara, melainkan turut serta terlibat dalam lingkaran kesosialitasan solidaritas sebagai manusia (dunia). Dalam alam pikir Pancasila, aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkaran pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh (Latif, 2015). Demikian cara berada manusia Pancasila dalam alam pikir Pancasila sila ketiga "Persatuan Indonesia"

#### **4.4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa gagasan mengenai sila ini adalah sebagai berikut: "Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua,' satu buat semua, semua buat satu.' *Saja yakin, bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja Negara Indonesia ialah permusjawaratan, perwakilan.*" Lebih dalam, menurutnya Soekarno demokrasi Indonesia adalah "demokrasi di mana perjuangan dilakukan dengan

permusyawaratan untuk mencapai mufakat melalui wakil-wakil rakyat di badan perwakilan rakyat."

Menurut Notonagoro dalam sila keempat ini berisi terkandung cita-cita kerakyatan dalam arti bahwa negara adalah "alat bagi keperluan seluruh rakyat serta pula cita-cita demokrasi ekonomi" dan musyawarah atau demokrasi politik yang diwujudkan dalam "asas politik Negara." Dengan sila ini hendak ditunjukkan bahwa negara berkedaulatan rakyat sebagai cita-cita politik yang mengandung tiga unsur yaitu negara buat seluruh rakyat, demokrasi sosial-ekonomi, dan demokrasi politik (Notonagoro, 1980). Dengan kerakyatan hendak disampaikan pula bahwa negara adalah "untuk keperluan seluruh rakyat" dan memuat "cita-cita kefilosofan demokrasi sosial-ekonomi." (Notonagoro, 1980)

Prinsip utama dalam sila keempat ini adalah "kedaulatan rakyat" yang hendak menyatakan bahwa tidak ada manusia, elite, atau sekelompok ideolog, atau bahkan sekelompok tokoh agama tertentu yang berhak untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus hidup atau boleh hidup. Menurut alam pikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaanitu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Demokrasi menjadi sebuah cara berpolitik yang dipilih hendaknya dibangun dalam kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan ke mana mereka mau dipimpin (Suseno, 2021). Namun perlu diingat bahwa demokrasi di Indonesia adalah "kedaulatan rakyat ditambah prinsip perwakilan". Artinya, demokrasi terikat pada kata permusyawaratan/perwakilan dengan maksud bahwa "demokrasi politik yang diselenggarakan didalam permusyawaratan/perwakilan" dan sebagai "syarat mutlak bagi tercapainya maksud kerakyatan."(Notonagoro, 1980)

Frans Magnis menyebut, demokrasi yang baik hanya dapat berjalan di atas dua dasar, yaitu pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Suseno, 2021). Artinya dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terdapat jaminan bahwa prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas. Kedua, kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketaatan terhadap hukum (negara hukum demokratis). Artinya, kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi karena tentu itu adalah wujud mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang.

Dalam konteks refleksi atas kodrat manusia, sila keempat ini bisa dipahami dalam kerangka mengembangkan kehidupan bersama, maka cara mengambil keputusan yang

menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Cara berada yang menghormati manusia adalah dengan memandang manusia sebagai subjek yang berdaulat, bukan semata-mata objek manipulasi, eksploitasi, dan eskresi. Demikian cara berada manusia Pancasila dalam seturut alam pikir sila keempat Pancasila.

#### 4.5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini menurut Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 menghendaki “tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka”, “hidup dalam kesejahteraan” dengan terpenuhinya secara memadai kebutuhan-kebutuhan pokok, dan tegaknya dua prinsip yaitu keadilan politik (“persamaan *politiek*”) dan keadilan sosial (“kesedjahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”). Sedangkan menurut Notonagoro pangkal dasar dari keadilan sosial adalah terwujudnya “kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga hidup bersama.” (Notonagoro, 1980) Di samping itu, keadilan sosial dimengerti memiliki unsur seperti ditunjuk sila keempat yaitu «satu buat semua, semua buat satu, semua buat semua.” (Notonagoro, 1980) Keadilan sosial merupakan kesesuaian dengan “hakekat daripada adil, yaitu dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan sesuatu hak didalam hubungan hidup, dimana wajib lebih diutamakan daripada hak.” (Notonagoro, 1980)

Keberadaan atau eksistensi manusia adalah salah satunya dimensi kebertubuhan. Secara jasmani, manusia memerlukan papan, sandang, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Salah satu bentuk perwujudan khusus kemanusiaan adalah dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara adil. Secara padat bisa dikatakan bahwa keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat (Suseno, 2021). Segala bentuk kehendak baik apapun bentuknya akan menjadi sia-sia dan tidak ada artinya apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakatpun dimulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan.

Perwujudan keadilan sosial merupakan upaya untuk mencegah bahwa masyarakat terpecah dalam dua bagian, masyarakat kelas ekonomi atas yang semakin maju terus dan bagian bawah masyarakat yang paling-paling hanya bisa bertahan untuk hari berikutnya saja. Tuntutan atas keadilan sosial bagi Frans-Magnis tidak boleh dipahami secara ideologis. (Suseno, 2021) Artinya, penerapan keadilan sosial disamakan seperti penerapan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu. Penerapan keadilan sosial tidak bisa disamakan dengan sosialisme, keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataannya, keadilan sosial diupayakan dengan cara membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada

dalam masyarakat. Artinya, strategi perjuangan implementasi keadilan selalu dilihat dalam kerangka dengan mengkritisi bentuk-bentuk ketidakadilan dalam masyarakat.

Hal yang menjadi catatan adalah bahwa ketidakadilan-ketidakadilan itu bersifat structural dan bukan pertama-tama individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil masing-masing orang tertentu, melainkan berada dalam struktur-struktur kekuasaan politik/ekonomi/sosial/budaya/ideologis. Ketidakadilan structural yang merupakan ancaman paling serius adalah kemiskinan, selanjutnya adalah dikriminasi dalam banyak bidang terhadap perempuan, dikriminasi atas dasar ras, suku, budaya dan agama. Menurut alam pikir Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh kepenuhan arti sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial.

### **Kesimpulan**

Pada bagian ini akan coba ditawarkan beberapa alternatif strategi menjadi manusia Pancasila. Perlu ditegaskan bahwa Pancasila mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi moral berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan dimensi lahiriah yang berisi symbol, slogan dan lain sebagainya yang bisa ditangkap secara inderawi. Dalam proses pembudayaannya idealnya dimensi ini senapas dalam implemntasinya. Artinya, penanaman dimensi moral spiritual berserta dengan argumentasi rasional diperlukan. Dengan penanaman dimensi moral nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, harapannya setiap anggota bangsa Indonesia memperoleh gambaran yang utuh tentang Pancasila dan selalu siap berdiskursus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang terjadi dewasa ini. Secara konkret dibutuhkan upaya dari negara untuk mengukuhkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, strategi ini adalah mengupayakan pembudayaan moralitas Pancasila dari sisi negara. Tentu tidak bisa negara lepas tangan dan menyerahkan Pendidikan moral Pancasila kepada keluarga dan atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Negara harus menetapkan norma hukun dan norma etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menunjang nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan. Selanjutnya, mengembangkan gagasan yang ada dalam prinsip Pancasila menjadi Pancasila sebagai sebuah ilmu. Negara juga harus mengupayakan agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan konstitusi dan perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Hingga sampai pada mentransformasikan Pancasila yang semula



hanya melayani kepentingan vertical (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dengan melibatkan segala elemen dan kekuatan nasional dalam proses penafsiran, pengisian, dan penyebarluasan Pancasila. Dari sisi moral individual, dibutuhkan upaya untuk membuat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi terinternalisasi dalam diri setiap manusia Indonesia.

Upaya ini tentu bukan upaya yang serba cepat dan instan, melainkan harus terus pembiasaan. Bagaimana mengupayakan manusia-manusia Indonesia yang “berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala”. Masing-masing individu perlu mengikis mentalitas budak, hedonistic, kolonialistik, yang membuatnya tidak percaya diri dan hanya mencari keuntungan sendiri. Dibutuhkan upaya memperkuat wawasan Nusantara. Dimensi moral perlu diimbangi juga dengan dimensi lahiriah. Manusia itu butuh simbol lahiriah yang membuatnya semakin mudah untuk mengikatkan diri dalam perasaan moral yang sama, punya ikatan yang sama. Namun, kalau hanya berkuat pada dimensi-dimensi lahiriah tanpa diikuti dengan dimensi moral akan jatuh hanya pada gejala verbalisme semata. Artinya, pengahayatan Pancasila hanya akan berhenti pada slogan-slogan semata tanpa ada pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya.

### Daftar Pustaka

- Aristoteles, *Hist. Anim . I, 1: 488a7; Nichomachean Ethics I, 5: 1097b11; VIII, 12: 1162a16; IX, 9: 1169b18; Politics, I, 2: 1253a3*
- Bakker, Anton. (2000), *Antropologi Metafisik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Driyarkara, N. (2006), *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsaanya*, A. Sudirja, et.al. (ed), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Notonagoro, (1980), *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Djakarta.
- Heywood, A. (2012), *Political Ideologies: An Introduction*, Palgrave Macmillan, New York.
- Soekarno, (2002), *Revolusi Indonesia*, Galan Press, Yogyakarta.
- Suseno, Frans-Magnis, (2021), *Sekitar Etika Politik*, dalam webinar Pancasila dan Etika Politik, Circles.
- Wolters, A. M. (1983). *On The Idea of Worldview and Its Relation to Philosophy* dalam P.Marshall et.al. (ed), Stained Glass University Press of America, UK.
- Latif, Yudi, (2015), *Revolusi Pancasila*, Penerbit MIZAN, Yogyakarta.
- Latif, Yudi. (2018), *Wawasan Pancasila*, MIZAN, Yogyakarta.

### Website:

<https://plato.stanford.edu/entries/personalism/#ChaPerTho>